
KONFLIK SOSIAL ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA
(Study Strategi dan Kampanye Militer di Kota Balik Papan)**Oleh****Andi Azis Nizar¹⁾, Budi Pramono²⁾, Ridwan Gunawan³⁾****Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec.****Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810****Email: andiaziz@gmail.com****Abstrak**

Keruntuhan negara-negara terjadi manakala mereka tidak memiliki system pertahanan negara yang kuat. Ancaman yang dating tidak mengenal waktu, bisa dating kapan saja dan dimana saja. Demi bertahannya sebuah negara dari berbagai bentuk ancaman untuk itu diperlukan penyiapan strategi pertahanan negara sejak dini sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan pemerintah harus menggelar perang semesta. Pelibatan seluruh sumber daya nasional diperlukan termasuk sumber daya manusia, konflik sosial menjadi permasalahan serius dalam pembinaan kekuatan pertahanan sehingga harus dicarikan solusinya. Tulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif fenomenologi dan teori implementasi kebijakan pertahanan Lukman Yudho Prakoso untuk menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih perlu dilaksanakan penanganan yang baik dalam penanganan konflik sosial yang secara terintegrasi, dapat berkomunikasi secara interaktif antara entitas, pelaksanaan kegiatan yang transparan, terkontrol dan akuntabel. sehingga dalam kesimpulan dapat dirumuskan bahwa diperlukan penanaman nilai-nilai bela Negara dalam penanganan konflik sosial, sehingga diharapkan muncul kesadaran di tengah masyarakat untuk tanggungjawab dalam bela Negara. Kesimpulan lainnya adalah diperlukan suatu strategi membangun jaringan kerja yang terbaik dan keterlibatan satu entitas yang berfungsi sebagai Driver Force untuk penanganan konflik sosial dalam mendukung strategi kampanye militer.

Kata Kunci: Bela Negara, Driver Force, Konflik Sosial, Kampanye Militer, Strategi Pertahanan

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global, regional nasional berdampak kepada timbulnya ancaman actual maupun potensial terhadap Indonesia. Ancamana yang timbul saat ini bisa saja berupa ancaman militer, nonmiliter maupun hybrida. Salah satu yang menjadi ancaman yang telah terbukti banyak menghancurkan beberapa negara di dunia adalah konflik internal di dalam sebuah negara yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Indikator konflik internal yang terkait konflik sosial di Indonesia, hampir selalu ada di setiap wilayah. Sebagaimana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyadari hal ini dan telah memerintahkan seluruh kepala daerah untuk

membentuk Tim penyelesaian masalah konflik sosial tersebut (Lukman Yudho Prakoso, 2020)

Sistem pertahanan negara harus dapat menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Salah satu yang menjadi system pertahanan negara adalah kemampuan sebuah negara melaksanakan kampanye militer jika dibutuhkan. Kampanye militer adalah sebuah operasi militer dengan skala besar lama-lama signifikan strategi militer rencana menggabungkan serangkaian saling terkait operasi militer atau pertempuran membentuk bagian yang berbeda dari konflik yang lebih besar sering disebut perang. Pelaksanaan kampanye militer memerlukan seluruh sumber daya nasional termasuk sumber daya manusia (Lukman Yudho Prakoso, 2021)

Sistem pertahanan yang tangguh menjadikan sebuah negeri memiliki efek deterrence atau efek penggentar bagi pihak mana saja yang berniat buruk mengganggu. Pasal 30 UUD 1945 menyatakan bahwa pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga sangat diperlukan kondisi sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter dapat membela negaranya jika waktunya diperlukan. Bagaimana warga negara dapat dimanfaatkan untuk system pertahanan negara misalnya dalam pelibatan dalam kampanye militer, jika kondisi yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat banyak konflik sosial (Kasih Prihantoro et al, 2021)

Pemilihan lokus penelitian di Balikpapan, karena daerah tersebut merupakan wilayah strtaegis nasional dimana wilayah tersebut menjadi wilayah yang secara signifikan memberi kontribusi signifikan kepada negara sebagai wilayah sebagai penghasil bahan bakar nasional. Sementara kondisi actual dan potensial konflik sosial yang terjadi cukup besar. Pertimbangan ilmiahnya bahwa jangan sampai konflik sosial yang terjadi dapat mengganggu stabilitas nasional jika pasokan energi terganggu dari Balikpapan. Selain itu dalam melaksanakan kampanye militer diperlukan dukungan logistic berupa energi bahan bakar (Cecep Kurniawan et al, 2020). Pengamanan daerah Balikpapan ini menjadi prioritas. Untuk itu permasalahan konflik sosial menjadi hal yang sangat penting untuk dicarikan solusinya agar dapat memperkokoh stabilitas negara, dan juga dapat dimanfaatkan untuk strategi kampanye militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), sebagaimana diungkapkan oleh Zed (2004) yang menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian, sehingga dalam penelitian ini referensi kepustakaan menjadi

sumber utama. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai literatur, karangan ilmiah, baik berupa buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata.

Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, laman web dan referensi lainnya yang dianggap relevan dengan tema dalam penelitian ini, yaitu mengkaji pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis deskriptif, dimana diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data tersebut, adapun data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka (Surakhmad, 1990). Dalam hal ini data-data mengenai pengembangan desa wisata dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian oleh peneliti dilakukan analisis dan interpretasi dari data tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik sosial merupakan fenomena di masyarakat yang biasa muncul saat perbedaan antarindividu ataupun kelompok tidak dapat didamaikan. Meskipun penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat, banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Sebagai gejala sosial, konflik sebenarnya hal yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat. Sebab, setiap individu atau kelompok punya keinginan meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, prestise, dukungan sosial, hingga mengakses berbagai sumber daya (Endah Palupi et al, 2020).

Saat individu atau kelompok punya keinginan yang sama dengan individu atau kelompok lainnya, sementara keinginan tersebut terkait dengan sumber daya yang langka, lahirlah kompetisi. Adapun proses kompetisi yang berlebihan bisa berujung pada konflik. Sama halnya ketika individu atau kelompok punya keinginan berbeda dengan individu kelompok lain, perselisihan akan lahir.

Perselisihan tersebut bisa berujung pada konflik jika tak terdamaikan.

Sementara dalam ilmu sosiologi, konflik sosial dipahami sebagai bentuk salah satu dampak proses interaksi sosial. Interaksi sosial dianggap bisa membawa efek asosiatif atau mempererat hubungan antarindividu di masyarakat, dan juga bisa memunculkan dampak disosiatif, merenggangkan hubungan. Contoh bentuk asosiatif adalah kerja sama. Adapun contoh bentuk disosiatif yaitu konflik, demikian seperti dikutip dari Rumah Belajar Kemdikbud. Ada banyak cara pandang terhadap konflik sosial di sosiologi. Maka itu, konflik sosial juga tidak selalu dinilai sebagai hal yang negatif. Dalam kehidupan masyarakat, konflik juga dapat berupa proses instrumental yang mengarah pada pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial serta dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Bahkan dengan konflik, kelompok dapat memperkuat kembali identitas dan solidaritas di antara anggotanya (Angkasa Dipua et al, 2020).

Di sisi lain, ada banyak macam jenis konflik sosial di masyarakat. Macam-macam konflik sosial itu terbagi dalam berbagai kategori. Perinciannya bisa dicermati dalam pemaparan berikut ini.

1. Konflik sosial berdasarkan posisi pelaku Berdasarkan posisi pelaku, konflik sosial bisa dibedakan jadi 2 macam. Keduanya: konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik antarpihak yang derajat atau kedudukannya sama. Contoh konflik sosial ini adalah pertikaian dengan kekerasan antarsuku, atau tawuran antarwarga beda kampung. Sementara konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar. Contoh konflik vertikal adalah bentrok polisi dan masyarakat yang menolak digusur (Davis Lebo et al, 2021).
2. Konflik sosial berdasarkan sifat pelaku Berdasarkan sifat pelaku, konflik sosial bisa dibedakan menjadi konflik terbuka

dan tertutup. Kedua jenis ini berbeda dari segi penampakan konfliknya. Untuk yang pertama, yakni konflik terbuka, adalah konflik sosial yang diketahui oleh semua orang. Jadi, konflik itu tidak hanya diketahui oleh pihak yang terlibat, tapi juga khalayak umum yang tak terkait dengannya. Contoh konflik sosial terbuka ialah demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa pada 1998, demo aktivis dan mahasiswa menolak Omnibus Law, dan sejenisnya. Sementara konflik tertutup merupakan konflik yang diketahui oleh beberapa pihak saja, misalnya oleh pihak yang terkait saja. Contohnya, pemberian gaji pada karyawan WNI dengan karyawan WNA di suatu perusahaan tidak sama, padahal peran keduanya dalam bekerja setara. Namun, konflik sosial ini belum muncul ke permukaan sehingga tidak diketahui oleh siapapun di luar perusahaan.

3. Konflik sosial berdasarkan waktu Berdasarkan kategori waktu, konflik sosial dibedakan menjadi konflik sesaat (spontan) dan konflik berkelanjutan. Konflik sesaat dapat terjadi dalam waktu singkat atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Contohnya: bentrok antarwarga karena masalah salah paham. Sedangkan konflik berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Hal ini bisa dilihat contohnya pada konflik antarsuku yang berkepanjangan.
4. Konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi Jika dilihat berdasarkan tujuan organisasi, macam-macam konflik sosial bisa dipilah menjadi konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Contohnya, persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok

berlomba dalam meraih prestasi. Adapun konflik disfungsi adalah konflik yang menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi dan bersifat destruktif (merusak). Contohnya adalah konflik perebutan posisi ketua satu organisasi yang berujung pada perpecahan pengurus, bahkan mungkin sampai memicu bentrok kekerasan.

5. Konflik sosial berdasarkan pengendaliannya Apabila ditelisik berdasarkan pengendaliannya, konflik sosial dapat dikategorikan jenisnya menjadi 4, yakni konflik terkendali, konflik tidak terkendali, konflik sistematis, dan konflik nonsistematis. Pertama, konflik terkendali terjadi saat pihak-pihak yang terlibat dapat mengendalikannya dengan baik, sehingga perselisihan tidak menyebar dan membesar dengan cepat. Contohnya, konflik antara karyawan dengan perusahaan mengenai nilai gaji. Kemudian konflik itu ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja melalui proses mediasi, dan akhirnya terjadi kesepakatan. Kedua, konflik tidak terkendali merupakan konflik sosial yang menimbulkan akibat yang tak dapat dikendalikan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga berujung pada aksi kekerasan. Contoh jenis ini adalah bentrok dengan kekerasan antara polisi dan massa demonstrasi. Ketiga, konflik nonsistematis dapat terjadi walaupun tanpa perencanaan dan keinginan menang yang kuat. Pihak yang terlibat konflik tidak menganalisis bagaimana konflik bisa dikendalikan atau memperoleh hasil yang memuaskan. Contoh konflik nonsistematis adalah perkelahian antarkelompok pelajar yang tiba-tiba saja terjadi, hanya karena kasus senggolan motor di jalan. Keempat, konflik sistematis terjadi karena ada perencanaan yang disusun sebelumnya. Tidak cuma agar tujuan tercapai, tapi

juga dengan strategi tertentu supaya salah satu pihak pemenang dapat menguasai pihak lain. Untuk memenangkan konflik, pihak yang berkonflik merencanakan cara untuk dapat menundukkan dan menguasai lawan. Contoh konflik sistematis ini bisa terlihat pada pertikaian antarpartai politik, atau antarkelompok organisasi kemasyarakatan (Muhammad Madrohim, 2021).

Dari hasil pemetaan potensi konflik sosial Polda Kaltim, tercatat sebanyak 199 potensi konflik ada di wilayah ini. Secara keseluruhan dibagikan dari jenisnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 109 kasus. Kemudian 16 kasus Suku, Agama, Ras, Antara Golongan, sumber daya alam terdapat 54 kasus dan kasus batas wilayah telah dipetakan sebanyak 20 kasus. Untuk peringkat pertama paling banyak konflik di daerah Kabupaten Kukar dengan 67 kasus Ipoleksosbud, satu kasus Suku, Agama, Ras, Antara Golongan, kasus sumber daya alam sebanyak enam dan dua kasus batas wilayah. Kasus-kasus ini timbul dari arus bawah yang menyebar secara luas. Contoh beberapa kasus Suku, Agama, Ras, Antara Golongan lebih mengedepankan emosi sesaat tetapi akibatnya meluas karena bersinggungan antaretnis. "Kasus-kasus antaretnis cepat menyebar walau itu masalah sepele seperti perebutan lahan parkir dan sebagainya," potensi konflik ini bisa saja bertambah ketika Kaltim akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur atau Pemilihan Anggota Legislatif nanti. Bahkan saat ini sudah ada pengawasan pada pemilihan Bupati Paser yang sedang berlangsung (Guntur Eko Saputro et al, 2021).

Di Kalimantan Timur pada masa-masa pemilihan Presiden, Kepala Daerah menjadi rentan terjadinya konflik di masyarakat. Sehingga diperlukan penanganan yang cepat, tepat dan tegas. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Daerah. Tim terpadu ini mengikutsertakan seluruh unsur

yang terkait dan sangat strategis terutama dalam upaya memberikan jaminan adanya satu kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan saSuku, Agama, Ras, Antara Golongann maupun rencana aksi dalam penanganan keamanan daerah (Mohammda Rachmad et al, 2021).

Sesuai dengan instruksi Presiden agar segera dibentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan baik di tingkat pusat maupun daerah. Bertujuan untuk melakukan penanganan serta langkah-langkah antisipasi terjadinya konflik dalam negeri. Kaltim telah membentuk lembaga tersebut, dengan melibatkan seluruh unsur Forkominda Kaltim (Gubernur, Kejati, Pangdam, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi) maupun Bupati/Walikota bersama Kejari, Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan.

Tim Terpadu Kaltim telah diundang ke tingkat pusat bersama tim terpadu provinsi lainnya untuk menyampaikan rencana aksi yang dilaksanakan di daerah. Terutama langkah cepat, tepat dan tegas serta profesional dalam menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme sesuai hukum dan menghormati adat istiadat.

Kaltim telah memiliki peta potensi konflik sosial yang perlu diambil langkah antisipatif dengan melibatkan seluruh potensi di daerah, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama serta tokoh adat dengan mengoptimalkan peran aparat keamanan di tingkat desa. Karenanya diperlukan rencana aksi yang dilakukan tim terpadu terutama berkenaan dengan rekonsiliasi, rehabilitasi bahkan kemungkinan adanya rekonstruksi agar masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitasnya. Apalagi, setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara hasil pemekaran Provinsi Kaltim serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu pecahan dari Kutai Barat.

Walaupun secara mayoritas masyarakat Kaltara (Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan) telah

menerima atas diterbitkannya UU tentang pembentukan daerah otonomi baru di Kaltim itu. Terhadap kondisi-kondisi ini hendaknya tim terpadu maupun aparat keamanan di tingkat paling bawah untuk selalu meningkatkan koordinasi dan monitoring yang intensif guna pencegahan terjadinya konflik sosial itu.

Selain itu, perlu diwaspadai konflik-konflik yang telah mereda selama ini yang dikhawatirkan sewaktu-waktu akan muncul kembali. Khususnya dalam memasuki tahun politik baik dalam pemilihan kapala daerah maupun anggota legislatif serta Pilpres “Terpenting dan paling mendasar penanganan dan antisipasi terjadinya konflik merupakan tanggungjawab bersama dan tujuan saya mengumpulkan kita semua disini adalah untuk menyatakan satu kata yakni Kaltim harus tetap aman, damai dan demokratis.

Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.

Bela negara bisa dilihat secara mikro dan makro sesuai dengan negara masing-masing elemen kehidupan. Secara mikro, implementasi bela negara diwujudkan oleh setiap elemen kehidupan dalam bentuk pembelaan terhadap tempat di mana kaki

berdiri dan di mana nafkah sebagai belanja hidup didapat. Ini berarti, akan adanya perlawanan pada setiap intervensi yang datang dari negara lain. Dengan bahasa sederhana dapat dinyatakan bahwa menentukan pilihan hidup adalah hak. Namun, setelah menjatuhkan pilihan maka di situ ada kewajiban yang harus ditunaikan. Menunaikan kewajiban hidup sebagai manusia yang bermartabat pada tempat kaki berpijak itulah bentuk bela negara secara mikro ditunjukkan. Secara makro, bentuk bela negara diwujudkan dengan kemampuan menggerakkan semua elemen pendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, aman, tenteram, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian, pengambilan keputusan dilakukan dengan mufakat bulat sehingga tidak ada tempat untuk lari dari tanggung jawab.

Wujud bela negara dalam berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat digambarkan sebagai berikut :

1. Lingkungan Keluarga: memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, demokratis, menjaga nama baik keluarga dll.
2. Lingkungan Sekolah: patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, dll
3. Lingkungan Masyarakat: aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat.
4. Lingkungan berbangsa dan bernegara; menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, melestarikan adat dan budaya asli daerah.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan UU 1945 pasal 27 ayat 3, mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

“Sedangkan pada pasal 30 ayat 1, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara. Dari dua kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia”. semua anak negara, harus bergerak dan tergerak untuk menjaga negara sesuai dengan ladang pengabdian masing – masing.

“Panggilan bela negara, bisa dilakukan oleh petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, buruh, PNS, pedagang maupun profesi – profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masyarakat”. Bagi para pemuda yang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, merupakan salah satu bagian dari bela negara. Begitu pula dengan teman – teman yang saat ini berada di garda depan dalam penanganan Covid – 19. “Sebab tanpa adanya mereka, bela negara tidak akan dapat berjalan dengan baik”.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian Strategi Kampanye Militer Melalui Pemantapan Nilai Bela Negara (Studi Penanganan Konflik Sosial di Balikpapan) mendapatkan kesimpulan bahwa penanaman nilai-nilai Bela Negara pada masyarakat sangat penting dilaksanakan untuk mencegah konflik sosial terus berlangsung dari waktu kewaktu. Yang menjadi temuan signifikan dalam penelitian ini adalah bahwa penanganan konflik sosial di Balikpapan telah dilakukan secara terintegrasi antara entitas terkait, telah terjalin juga komunikasi yang interaktif antara entitas, juga telah memiliki faktor transparansi anggaran, sistem control yang baik dan sudah akuntabel, namun konflik masih sering terjadi disebabkan kebanyakan proses politik pemilihan kepala pemerintahan pusat/daerah atau pemilihan legislative, sehingga dari temuan ini merumuskan suatu strategi agar penanganan konflik sosial ini memiliki jaringan kerja secara nasional dan juga ada entitas yang menjadi *driver force* nya sehingga diharapkan dapat efektif dan efisien dalam mendukung strategi kampanye militer, jika suatu ketika

Indonesia dalam kondisi yang sangat terpaksa harus memobilisasi semua komponen nasional dalam menghadapi musuh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2), 169–188.
- [2] Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 65–86.
- [3] Dipua, A., Hermawan, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Rizanny, D., & Prakoso, L. Y. (2020). An Analysis of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts and Recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- [4] Dipua, A., Prakoso, L. Y., & Nurdiansyah, D. R. D. R. (2021). ANALYSIS OF DEFENSE STRATEGY POLICIES IN DEALING WITH THE POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT. *Jurnal Pertahanan*, 7(1), 89–99. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal>
- [5] Guntur Eko Saputro, L. Y. (2021). Implementation of Economic Policies Facing Covid 19 in Supporting Nonmilitary Defense. *International Journal of Social Science And Human Research*, 634–642.
- [6] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 15–30.
- [7] Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2020). Strategi Pertahanan Laut dalam Analisa Dampak dan Upaya Pemerintah Mengamankan ALur Laut Kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 273–296.
- [8] Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2018). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Strategi Pertahanan Laut*, 4(1), 1–18.
- [9] Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2), 51–64.
- [10] Kaltim Prov (2021), <https://kaltimprov.go.id/berita/penanganan-konflik-di-daerah>
- [11] Kompas (2021) <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/11031171/mendagri-minta-kepala-daerah-bentuk-tim-terpadu-untuk-tangani-konflik-sosial>
- [12] Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019b). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(3), 103–116.
- [13] Lebo, D., Pramono, B., Prakoso, L. Y., Risman, H., & Akrimi, N. (2021, April 6). The Total War Strategy through Optimizing the Understanding of Pancasila Values in the Millennial Era. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.273>
- [14] Madrohim, M., & Prakoso, L. Y. (2021). The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.245>
- [15] Palupi, E., S., DAR, D., Suhardono, E., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., & Bangun, E. (2021, March 26). Sea Defense Strategy Strengthening Through Improving The Readiness of Indonesian Naval Vessel

- Crew (Study: The Health Office of 1st Fleet Command) E. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.266>
- [16] Pramono, A. : B., & editor, L. Y. P. (2021). Politics and national defense. Publisher : CV. Aksara Global Akademia,.
- [17] Pramono, A. : B., & editor, L. Y. P. (2021). Politics and national defense. Publisher : CV. Aksara Global Akademia,.
- [18] Prakoso, Lukman Yudho, Suhirwan, & Prihantoro, K. (2020). Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 200–211. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33172/jp.v6i2>
- [19] Prakoso, Lukman Yudo, Prihantoro, K., & Suhirwan, S. (2021). *Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan*. CV. AkSuku, Agama, Ras, Antara Golongan Global Akademia.
- [20] Prakoso, L. Y. (2021). Implementation of Defense Policy Against Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1).
- [21] Prakoso, L. Y., Salim, G., Indarjo, A., & Yusriadi. (2021). IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–8. <https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-dfense-public-policy-defend-the-state-in-indonesian-universities.pdf>
- [22] Prihantoro, K., Prakoso, L. Y., Suhirwan, S., & Kusmiati, M. (2021). *Metode SWOT AHP dalam Merencanakan Strategi Pertahanan*. CV. AkSuku, Agama, Ras, Antara Golongan Global Akademia.
- [23] Rachmad, M., S., Zaini, A., Bangun, E., Prakos, L. Y., R., D. D. A., & Sianturi, D. (2021, March 26). Strengthening the Marine Defense Strategy of Lanal Banten Area through Empowerment of the Traffic Separation Scheme in the Sunda Strait. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.268>
- [24] Sumbarprov (2021), <https://sumbarprov.go.id/home/news/16115-wujud-bela-negara-dalam-kehidupan-bermasyarakat>
- [25] Smartcity (2021), https://smartcity.patikab.go.id/index.php/d_ata_berita/detail/berita_online/9940
- [26] Widiarto, S., S., Prakoso, L. Y., S., Suhardono, E., Warka, I. W., & D.A.R, D. (2021, March 17). Optimization of Sea Defense Strategy Through Operation of the Hospital Auxiliary Vessel to Support National Defense. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.262>
- [27] Yuniarti (2018), Upaya Penanganan Konflik Sosial Di Kalimantan Timur (Studi Kasus: Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur), <https://docplayer.info/122936406-Upaya-penanganan-konflik-sosial-di-kalimantan-timur-studi-kasus-samarinda-balikpapan-kutai-timur.html>